

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA DI DESA MEKAR JAYA KECAMATAN
LALAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

SKRIPSI



Nama : Rohman Aziz Saputra
Nim : 222015025

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA DI DESA MEKAR JAYA KECAMATAN
LALAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Nama : Rohman Aziz Saputra
Nim : 222015025

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rohman Aziz Saputra

Nim : 222015025

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Februari 2020
Penulis,



Rohman Aziz Saputra

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Desa di Desa Mekar Jaya Kecamatan
Lalan Kabupaten Musi Banyuasin
Nama : Rohman Aziz Saputra
NIM : 222015025
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal.....2020

Pembimbing I

Welly, SE, M.Si
NIDN/NBM: 0212128102/1085022

Pembimbing II

Darmayanti, SE, Ak, MM, CA
NIDN/NBM: 0219057901/1187172

Mengetahui,
Dekan
u.b Ketua Program Studi Akuntansi



Betri SiraJudin, SE, Ak, M.Si, CA
NIDN/NBM: 0216106902/994806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- *“Jika Kamu ingin hidup lebih bahagia, maka ikatkanlah simpul kehidupan pada tujuan yang ada, bukan pada benda mati ataupun manusia.”*
- *“Bersyukurlah dengan apa yang Kamu miliki saat ini, karena belum tentu orang lain memilikinya.”*

(Rahman Aziz Saputra)

Dengan ridho ALLAH SWT

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- *Ayahku dan Ibuku*
- *Pembimbing Skripsiku*
- *Almamaterku*

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “**Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Mekar Jaya Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin**” tepat pada waktunya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa indikator transparansi, masyarakat kurang mendapatkan informasi, anggaran keuangan desa yang terealisasi sebesar 75%. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, yaitu perencanaan dikatakan telah terealisasi secara optimal, pelaksanaan program kegiatan masih dihadapkan dengan salah satu kendala terbesar yaitu akses jalan darat yang kurang memadai, laporan realisasi pengelolaan keuangan desa menurut sudah dilaporkan, penatausahaan telah dilakukan dengan melakukan pencatatan pendapatan dan pembiayaan keuangan desa oleh Bendahara Desa, Kepala Desa telah melaporkan keuangan desa kepada Bupati melalui Camat dimana terdapat sisa anggaran untuk Desa Mekar Jaya.

Dengan selesainya skripsi ni, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Welly, SE, M.Si., dan Ibu Darmayanti, SE,A.k, MM. CA., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingannya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak DR. M. Abid Djazuli, SE.,M.M., selaku Rektor dan staf Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M., selaku Dekan dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin, SE., M.Si., Ak., CA., selaku ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Nina Sabrina, SE.,M.Si., selaku sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
5. Almamaterku.

Semoga Allah SWT, berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan oleh keterbatasan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran untuk penyempurnaan penulisan ini sangat penulis harapkan.

Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarokatu.

Palembang, Februari 2020
Penulis,

Rahman Aziz Saputra

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRAKATA	v
HALAMAN DAFTAR ISI	vii
HALAMAN DAFTAR TABEL	ix
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	x
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	12
1. Transparansi	12
2. Akuntabilitas	14
3. Pengelolaan Keuangan Desa	17
B. Penelitian Sebelumnya	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	22
B. Lokasi Penelitian	23
C. Operasional Variabel	23
D. Data yang Diperlukan	24

E. Metode Pengumpulan Data	24
F. Analisis Data dan Teknik Analisis Data	25
1. Analisis Data	25
2. Teknik Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	27
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	27
2. Gambaran Umum Pemerintahan Desa di Kecamatan Lalan..	28
B. Pembahasan Hasil Penelitian	38
1. Pembahasan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa	39
2. Pembahasan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	45
3. Pembahasan Pengelolaan Keuangan Desa	49
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	63
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya 21
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel 23
Tabel IV.1	Wilayah Administrasi Kabupaten Musi Banyuasin 27
Tabel IV.2	Pendapatan dan Realisasi Keuangan Desa Mekar Jaya 38
Tabel IV.3	Penatausahaan Keuangan Desa di Desa Mekar Jaya Tahun 2015 56
Tabel IV.4	Penatausahaan Keuangan Desa di Desa Mekar Jaya Tahun 2016 57
Tabel IV.5	Penatausahaan Keuangan Desa di Desa Mekar Jaya Tahun 2017 58
Tabel IV.6	Penatausahaan Keuangan Desa di Desa Mekar Jaya Tahun 2018 58
Tabel IV.7	Pelaporan Keuangan Desa Mekar Jaya 60
Tabel IV.8	Indikator Kesesuaian Desa di Desa Mekar Jaya 61
Tabel IV.9	Pertanggungjawaban Pelaporan Keuangan Desa 62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa	29
Gambar IV.2 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa	30
Gambar IV.3 Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	30
Gambar IV.4 Alur Perencanaan Dana Desa	50
Gambar IV.5 Proses Perencanaan Permendes	54
Gambar IV.6 Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa	54

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

- Lampiran 1. Surat Selesai Riset dari Pemerintah Desa Mekar Jaya
- Lampiran 2. Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3. Lembar Persetujuan Skripsi
- Lampiran 4. Sertifikat Membaca dan Menghapal Al-Qur'an (Surat Pendek)
- Lampiran 5. Sertifikat Toefl
- Lampiran 6. Pedoman Wawancara
- Lampiran 7. Biodata Penulis

ABSTRAK

Rohman Aziz Saputra/ 222015025/ 2020/ Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Mekar Jaya Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Mekar Jaya Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian dilaksanakan pada Desa Mekar Jaya Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara terhadap masyarakat dan pemerintah desa, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berasal dari dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan cara melakukan uraian dan penjelasan mengenai transparansi, akuntabilitas dan pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa transparansi pelaporan keuangan desa pada indikator informatif tidak sesuai, indikator keterbukaan tidak sesuai, sedangkan pada indikator pengungkapan telah sesuai. Akuntabilitas pelaporan keuangan desa dengan indikator akuntabilitas kejujuran dan hukum sudah terlaksana dengan baik, indikator akuntabilitas manajerial sudah dilakukan, indikator program belum menunjukkan adanya kepuasan pada masyarakat, sedangkan pada akuntansi kebijakan meskipun telah berjalan namun tidak melibatkan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa dengan indikator perencanaan hanya terealisasi 75% atau 3 bidang dari 4 bidang, indikator pelaksanaan terhambat pada akses jalan transportasi, indikator penatausahaan sudah tereliasi dengan baik, indikator pelaporan menunjukkan adanya permasalahan pada sisa pendapatan (anggaran) tidak digunakan sebagaimana mestinya, dan indikator laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa telah terealisasi.

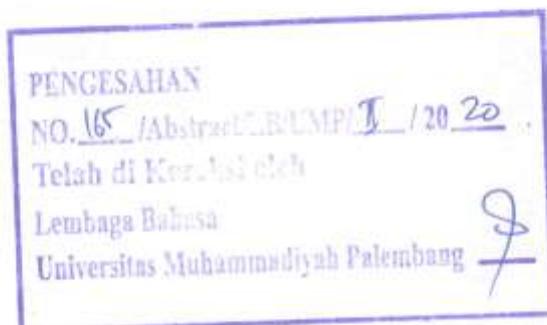
Kata Kunci: transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan desa

ABSTRACT

Rohman Aziz Saputra/ 222015025/ 2020/ *Transparency and Accountability Analysis of Village Finance Management in Mekar Jaya Village Lalan District Musi Banyuasin.*

This research aims to know and describe the transparency and accountability of the village's financial management in Mekar Jaya Village Lalan District Musi Banyuasin. This research includes descriptive research. Research conducted at the village of Mekar Jaya Lalan District Musi Banyuasin. This research uses primary data and secondary data. Primary data in the form of interviews to people and village governments, while secondary data in this research comes from documents. The data analysis used in this study is qualitative analysis by doing the description and explanation of transparency, accountability and financial management of the village. The results concluded that the transparency of the village's financial reporting on the informative indicator is not appropriate, the openness indicator is inappropriate, while the disclosure indicator is in compliance. Accountability of village financial reporting with an indicator of honesty and legal accountability has been carried out well, indicators of managerial accountability have been conducted, indicators of the program have not demonstrated any satisfaction in the community, whereas in accounting policy despite its running but not involving the public. Management of village finances with a planning indicator only realized 75% or 3 fields of 4 fields, the implementation indicator is hampered on transportation road access, the administration indicators are well-coordinated, the reporting indicators indicate that problems with the remaining income (budget) are not properly used, and the report indicator of the village's financial management accountability has Realized.

Keywords: *transparency, accountability, and financial management of the village*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Mulyani, 2017: 1).

Desa dalam Undang-undang tersebut didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Wijaya, 2018: 1).

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada

setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Untuk melaksanakan dan menunjang kegiatan tersebut salah satu bentuk bantuan langsung dari pemerintahan pusat adalah keuangan desa.

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut (Soleh dan Heru, 2014: 3). Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan dana desa adalah penyaluran dana desa dari APBN ke pemerintah desa. Walaupun dana desa merupakan hak pemerintah desa, namun dalam pelaksanaannya penyaluran dana desa tetap melibatkan peran dan fungsi pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pengelolaan keuangan desa bisa sangat sensitif di kalangan masyarakat, maka dari itu diperlukan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa agar tidak terjadi tuduhan buruk terhadap aparatur desa. Sehingga masyarakat mengetahui pengelolaan dan penggunaan keuangan desa pertahun. Seiring dengan menguatnya akuntabilitas, maka akan meningkat pula transparansi informasi kepada masyarakat luas sebagai pemenuhan hak publik. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung, dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk memonitor jalannya pembangunan di desa. Keuangan desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta pemukiman, honor tim pelaksana Keuangan desa dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting. Sedangkan pengelolaan keuangan desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik membutuhkan transparansi dan akuntabilitas dimaksudkan agar aparatur desa dapat berperilaku sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap

orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Sujarweni, 2015: 28). Dijelaskan pada Bab 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Penelitian sebelumnya mengenai analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa telah dilakukan Lina (2017) dengan judul: “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang,” hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolaan Keuangan Desa secara garis besar pengelolaan Keuangan Desa telah mencapai akuntabilitas. Selain itu masih diperlukan adanya pendampingan desa dari pemerintah daerah yang intensif dalam membantu desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian Gayatri (2017) dengan judul: “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan,” penelitian ini membuktikan bahwa terdapat hubungan antara penerapan transparansi dan akuntabilitas dengan pengelolaan keuangan dana desa dan hubungan antar variabel tersebut adalah kuat.

Penelitian Fernando (2018) mengenai: “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa,” hasil penelitian menyatakan bahwa: (1) Pemerintah Desa sudah melakukan dan menjalankan faktor transparansi dengan memasang baliho anggaran Alokasi Dana Desa di papan informasi kantor Desa Kauneran satu dan saran peneliti agar disetiap Dusun/jaga di pasang juga baliho anggaran ADD sehingga mampu meningkatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa; dan (2) Tetap mempertahankan faktor-faktor akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola Dana Desa (DD) di Desa Kauneran Satu, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa yang sudah dijalankan, sehingga dapat melakukan tugas maupun tanggungjawab dengan baik.

Penelitian Novi (2018) dengan judul: “Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas,” hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat dinamika dalam pengelolaan keuangan desa. Desa Sumberadi sudah melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebaliknya, Desa Tlogoadi belum mewujudkan pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel; serta belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan. Beberapa kendala yang dihadapi desa Tlogoadi, di antaranya belum efektifnya pembinaan terhadap aparatur desa, kurangnya pengawasan, kurangnya personil, dan kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap peraturan yang berlaku.

Penelitian Vilmia (2018) yang berjudul: “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang,” hasil analisis data menunjukkan tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di sepuluh desa telah menerapkan asas-asas akuntabilitas, prinsip partisipasi dan transparansi. hal tersebut dapat dilihat dari tingkat hadir masyarakat yang cukup partisipatif dalam mengikuti musyawarah. Pada tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan program alokasi dana desa yang telah dipampang di papan informasi dan ada pula yang dijadikan *banner*. Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro telah menerapkan asas-asas dan prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena laporan yang terkait dengan ADD sudah lengkap. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) secara fisik sudah cukup baik, meskipun ada satu desa yang pertanggungjawabannya secara fisik belum selesai rata-rata keseluruhan desa cukup akuntabel.

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 14.265,96 km² yang dibagi habis menjadi kecamatan dan selanjutnya kecamatan tersebut dibagi habis menjadi desa-desa dan kelurahan-kelurahan dengan jumlah penduduk 629.790 jiwa. Sementara itu, Kecamatan Lalan merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas 1.031 km². Jumlah penduduk Kecamatan Lalan pada tahun 2018 (estimasi penduduk pertengahan tahun 2018) berjumlah 42.359 orang dengan kepadatan penduduk sebesar 41,08 penduduk per km². Adapun desa

dengan jumlah penduduk terbesar adalah Desa Karang Agung dengan jumlah penduduk sebesar 3.581 jiwa. Sementara itu desa yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Desa Jaya Agung dengan jumlah penduduk sebesar 412 jiwa. Secara administratif, Kecamatan Lalan dibagi dalam 27 wilayah desa yang mencakup 114 dusun dengan rata-rata jumlah penduduk per dusun sebesar 371,57 jiwa. Dari 27 desa yang ada semuanya telah mempunyai kelengkapan aparat pemerintahan desa seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, LPMD dan BPD. Salah satu desa yang menjadi objek penelitian ini adalah Desa Mekar Jaya memiliki luas wilayah 14,00 km² dengan jumlah penduduk 893 jiwa dan kepadatan 63,79 per km². Alasan dipilihnya desa tersebut dikarenakan berdasarkan data laporan keuangan desa menunjukkan transparansi dan akuntabilitas yang kurang terealisasi.

Berdasarkan data laporan pengelolaan keuangan pada tahun 2018, yaitu terjadinya defisit anggaran sebesar Rp48.250.000 dari pendapatan desa Rp1.665.566.000 sedangkan jumlah belanja Rp1.713.816.000. Selain itu juga, dana yang masuk dan dana yang keluar di Desa Mekar Jaya hanya diketahui oleh satu pihak saja sehingga hal tersebut menyebabkan pengelolaan keuangan kurang transparansi. Terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sesuai dengan wawancara dengan aparatur desa tahap untuk pertanggungjawaban telah dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dengan mencantumkan kekayaan milik desa, laporan program sektoral dan program daerah masuk desa serta laporan penggunaan dana desa tahun anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 November 2019 dengan beberapa warga di Desa Mekar Jaya mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dinyatakan bahwa untuk variabel transparansi dengan indikator informatif, bahwa masyarakat kurang mengetahui pengelolaan keuangan desa dari dana transfer pemerintah pusat terkait penggunaannya untuk pembangunan desa. Mengenai informasi rincian APBDesa, warga tidak pernah mendapatkan penjelasannya secara langsung dari pemerintah desa ataupun ketua RT. Namun biasanya informasi tersebut hanya diketahui orang-orang yang terlibat dalam pemerintahan desa (Ponidi, wawancara pada tanggal 20 November 2019 pukul 14.15 WIB).

Indikator keterbukaan terhadap pengelolaan keuangan desa pada pihak yang membutuhkan tidak sesuai harapan masyarakat. Sebagaimana tanggapan masyarakat yang menyatakan bahwa tidak pernah diundang untuk mengikuti rapat. Mengenai informasi yang disediakan di media sosial seperti *Facebook*, *Instagram* dan *Watsapp*, tidak pernah diakses karena sebagian masyarakat tidak tahu cara pengoperasiannya. Sementara itu, jaringan seluler sering mengalami gangguan, apalagi untuk menggunakan media sosial. Warga mengharapkan diundang oleh pemerintah desa dibalai desa, untuk mendengarkan penjelasan pengelolaan keuangan (Darmawan, wawancara pada tanggal 20 November 2019 pukul 15.08 WIB).

Variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Mekar Jaya, yaitu untuk indikator perencanaan dinyatakan bahwa dari 4 bidang yang terealisasi hanya 3 bidang seperti penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pembinaan kemasyarakatan, sedangkan bidang

pemberdayaan masyarakat belum terealisasi. Menurut informasi dari masyarakat setempat bahwa dalam perencanaan program kerja, mereka tidak dilibatkan dalam memberikan masukan terkait dengan program yang harus dikerjakan, karena semua jenis perencanaan program yang kemudian dirancang oleh pemerintah desa dan dibahas berdasarkan diskusi diinternal pemerintah desa tanpa adanya musyawarah yang dilakukan bersama masyarakat (Ponidi, wawancara pada tanggal 20 November 2019 pukul 14.21 WIB).

Indikator pelaksanaan program kegiatan di Desa Mekar Jaya masih dihadapkan dengan salah satu kendala terbesar yaitu infrasturktur jalan darat yang kurang memadai sehingga dapat memperlambat pembangunan dan mengeluarkan biaya cukup banyak untuk mengangkut material, dan lebih lanjut menghambat tahapan pelaksanaan program dana desa di Desa Mekar Jaya, disisi lain banyak anggaran yang dikeluarkan untuk mengangkut material akan berdampak pada pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Indikator penatausahaan telah dilakukan dengan melakukan pencatatan pendapatan dan pembiayaan pengelolaan keuangan desa oleh Bendahara Desa, Kepala Desa telah melaporkan keuangan desa kepada Bupati melalui Camat dimana terdapat sisa anggaran. Sedangkan indikator pertanggungjawaban, kepala desa telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan keuangan desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pengelolaan keuangan desa diharapkan ada pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPDesa) agar dana desa tersebut disalurkan untuk pembangunan desa dengan baik. Pengelolaan keuangan desa harus bisa menjadikan desa tersebut lebih sejahtera, maka dari itu pemerintah desa atau aparatur desa dengan masyarakat harus menerapkan dan melaksanakan transparansi dan akuntabilitas. Aparatur desa dan masyarakat harus memiliki pemahaman tentang transparansi dan akuntabilitas tersebut agar pengelolaan keuangan desa tersebut dapat terealisasi dengan baik. Tetapi pada kenyataannya Desa Mekar Jaya belum mewujudkan dan melaksanakan sistem keterbukaan dan kejujuran antar perangkat desa dan masyarakat sehingga sangat mudah untuk terjadi penyelewengan atas dana desa tersebut. Hal itu terlihat dari masyarakat yang banyak tidak mengetahui informasi mengenai pengelolaan keuangan desa (Ponidi, wawancara pada tanggal 20 November 2019 pukul 14.32 WIB).

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Mekar Jaya Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Mekar Jaya Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Mekar Jaya Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman penulis mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi Lokasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan keuangan desa, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan dana desa.

3. Bagi Almamater

Diharapkan dapat menjadi referensi bahan kajian mahasiswa lain dan menjadi pertimbangan penting bagi penelitian yang serupa pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Farida, Vilmia. 2018. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. [*Jurnal Akademi Akuntansi 2018 Volume. 1 No. 1*], diakses di website: <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa> pada tanggal 14 November 2019, pukul 20:53:41 WIB.
- Ferarow, Novi. 2018. Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas. [*Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Vol 1 No 2 Hal 64-69 Oktober 2018*], diakses <http://journal.umy.ac.id/index.php/jati> pada tanggal 14 November 2019, pukul 21:02:19 WIB.
- Gayatri. 2017. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. [*JEKT. 10 [2]: 175-182*], Online diakses pada tanggal 14 November 2019, pukul 20:28:61 WIB.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Cetakan Pertama Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulyani, Sri. 2017. *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Kemenkue RI.
- Nafidah, Lina Nasehatun. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. [*Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 10 (2), Oktober 2017 P-ISSN: 1979-858X; E-ISSN: 2461-1190*], diakses di <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/akuntabilitas> pada tanggal 14 November 2019, pukul 20:15:21 WIB.
- Palupi, Sri, dkk.,. 2016. *Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*. Jakarta: Lakpesdam PBNU.
- Purnomo, Joko. 2016. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Infest Yogyakarta.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansiah. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, Ahmad. 2015. *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Tambuwun, Fernando Victory. 2018. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. [*Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4), 2018, 76-84*], Online diakses pada tanggal 14 November 2019, pukul 20:24:17 WIB.

Wijaya, David. 2018. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Gava Media.